

BAB II

KEBIJAKAN PERTAHANAN AMERIKA SERIKAT DI ASIA PASIFIK.

Di kawasan Asia Pasifik Amerika Serikat telah melakukan berbagai kerjasama khususnya pertahanan dengan negara-negara aliansinya. Hal tersebut bertujuan agar kepentingan-kepentingan AS di Asia Pasifik tetap terjaga. Beberapa kerjasama pertahanan AS tersebut terwujud dalam kerjasamanya dengan negara-negara yang berpotensi dapat mengimbangi kebangkitan Cina yaitu Jepang, Korsel, Filipina dan India. Maka pada bab ini penulis akan memaparkan situasi umum yang terjadi di kawasan Asia Pasifik dan kerjasama pertahan AS dengan negara-negara yang berada di kawasan tersebut.

A. Geopolitik di Kawasan Asia Pasifik

Kawasan Asia Pasifik adalah kawasan yang menjadi pusat perhatian global, kawasan ini merupakan kawasan paling strategis di dunia. Asia Pasifik juga merupakan kawasan yang paling dinamis pertumbuhan ekonominya. Posisi strategis tersebut menjadikan Asia Pasifik menjadi pusat aktivitas yang penting dalam percaturan politik global. Posisi strategis tersebut tentu akan mengakibatkan konstelasi konflik serta kerja sama yang tidak hanya melibatkan negara di kawasan tetapi juga melibatkan *superpower state* di luar kawasan. Peran aktif Amerika Serikat (AS) di kawasan ini telah menimbulkan berbagai spekulasi akan stabilitas keamanan kawasan ini.

Pasca Perang Dingin, kebijakan keamanan AS banyak berfokus di kawasan Timur Tengah, AS seakan ‘terlupakan’ dengan kawasan Asia Pasifik. Kemunculan Cina dengan kekuatan ekonomi dan militernya dalam beberapa dekade terakhir, kini kembali menyadarkan AS tentang arti geopolitik

dan geostrategi di Asia Pasifik. Pada masa kepemimpinan Obama arah kebijakan AS berubah dari yang berfokus di Timur Tengah ke Asia Pasifik sesuai dengan kebijakan *US Pivot to Asia (Rebalancing Asia)*. Rivalitas keamanan antara AS dan Cina akan menjadi isu regional terpenting dalam beberapa tahun kedepan (Bendini, 2016).

Peningkatan pengaruh Cina, semakin tak terelakkan, Cina telah menjadi pusat gravitasi baru di kawasan, sebuah kondisi yang harus diterima oleh AS. Selain mempunyai ambisi yang sangat besar, Cina juga didukung oleh kekuatan ekonomi sehingga upaya strategi rebalancing AS semakin sulit. Kesulitan tersebut antara lain juga terlihat dari kompleksnya permasalahan Cina dengan Taiwan, nuklir Korea Utara, permasalahan teritorial maritim Laut Cina Selatan yang mana, aspek-aspek tersebut berimplikasi pada kehadiran militer AS di kawasan Asia Pasifik (Syahrin, 2015). AS perlu membuat pilihan dilematis antara kepentingan domestiknya dan keunggulan militer di kawasan. Preferensi dan kepentingan Cina pada dasarnya memang akan konfrontatif dengan kepentingan AS karena kepentingan nasional yang utama bagi Cina adalah klaim teritorial Laut Cina Selatan dan Timur yang bertentangan dengan batas-batas maritim negara aliansi AS.

Setengah abad yang lalu, tantangan keamanan yang dihadapi Jepang, Korea Selatan, dan AS secara umum dapat dikatakan lebih mudah dan berpusat pada pencegahan terulangnya konflik Korea tahun 1950-1953. Namun, perkembangan selama 20 tahun terakhir telah menyebabkan munculnya tantangan kerja sama yang baru lebih penting dan juga lebih sulit bagi Amerika Serikat dan dua mitra keamanan Asia Timurnya. Salah satu perkembangannya adalah kebangkitan Cina, dan keterlibatannya yang semakin dalam di Semenanjung Korea.

Hingga 1992 Seoul dan Beijing tidak memiliki hubungan diplomatik dan perdagangan bilateral antara kedua negara sangat minim. Namun hari ini, Cina adalah mitra dagang

terbesar Korea Selatan, mengambil 25% dari ekspor yang terakhir, dibandingkan dengan hanya 10% persen untuk Amerika Serikat, mitra dagang terbesar kedua. Cina juga merupakan satu-satunya dermawan Korea Utara, dan perusahaan-perusahaan Cina bertindak sebagai perantara utama dalam hubungan ekonomi-politik Korea Utara dengan dunia yang lebih luas, termasuk bahkan Korea Selatan (Russel, 2017).

Sengketa Laut Cina Selatan juga menjadi perhatian dunia. Cina telah melakukan berbagai tindakan untuk memenangkan pencatutan wilayah tersebut dengan beberapa negara yang terlibat. Klaim ini dapat menimbulkan berbagai ketegangan tidak hanya dengan AS tetapi juga akan membahayakan hubungan Cina dengan negara tetangganya. Klaim teritorial ini menyiratkan adanya tabrakan kepentingan langsung dengan beberapa sekutu terdekat AS di kawasan, seperti Jepang, Filipina, dan Korea Selatan (Bendini, 2016).

Sengketa tumpang tindih kepemilikan Laut Cina Selatan terutama Kepulauan Spratly belum berakhir hingga sekarang. Secara strategis, negara-negara sekeliling Laut Cina Selatan selama Perang Dingin pernah menjadi pangkalan militer dan aliansi dengan AS. Berakhirnya Perang Dingin masih mempunyai sisa-sisa pengaruh bagi Malaysia dan Singapura yang pernah tergabung dalam *The Five Powers Defense Arrangement* bersama dengan Inggris, Australia, dan Selandia Baru (Roy, 1998).

Sedangkan kepemilikan nuklir Cina membuat situasi stabilitas keamanan kawasan menjadi terganggu. Dengan peran aktif nya memasok energi dan senjata nuklir ke beberapa negara seperti Korea Utara dan Pakistan, membuat instabilitas kawasan Asia. Kerjasama yang dibangun Cina dan Pakitan meningkatkan kapabilitasnya di Asia Selatan. Hal ini agar Pakistan dapat bersaing dengan India sebagai rival tetangganya. Konflik Kashmir tahun 1947 antara India dan Pakistan membuat dilema yang berkepanjangan, sehingga kerjasama Cina dan Pakistan akan membuat suatu kekuatan baru di

kawasan Asia Selatan (Budiman, 2014). Oleh karena itu, dalam menyikapi situasi tersebut AS melakukan berbagai kerjasama khususnya kerjasama pertahanan dengan negara negara sekutunya yang berada di kawasan Asia Pasifik seperti India, Jepang, Korea Selatan, dan Filipina.

B. Kerjasama Pertahanan AS Dengan Negara-Negara di Asia Pasifik

1. Aliansi kerjasama pertahanan antara AS, Jepang dan Korsel

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, intervensi AS dalam struktur keamanan Asia Timur tercipta melalui strategi pertahanan bilateral dengan Jepang dan Korea Selatan, AS memposisikan dirinya sebagai aktor utama, di mana fokus terhadap keamanan Asia Timur atau Pasifik Barat juga merupakan perwujudan dari keamanan nasional AS sendiri. Dengan pendekatan yang tidak jauh berbeda terhadap Jepang maupun Korsel, AS tetap menggaris bawahi bahwa ancaman tetap tidak akan berubah dari Korut dan Cina.

Asia Timur berada di antara sudut dunia yang paling dinamis dan paling berbahaya. Negara ekonomi utama di kawasan ini adalah Jepang, Cina, dan Korea Selatan yang secara keseluruhan, telah meningkatkan PDB kolektif mereka lebih dari 130 kali lipat selama setengah abad terakhir, dan telah lebih dari dua kali lipat bahkan selama dekade terakhir. Militer masing-masing negara di kawasan ini memiliki lebih dari 3 juta personel aktif, tidak termasuk pasukan milik AS, dan memiliki pasukan cadangan lebih dari 11 juta. Wilayah ini adalah rumah bagi tiga kekuatan nuklir selain AS (Rusia, Cina, dan Korea Utara) dan dua negara potensial lainnya (Jepang dan Korea Selatan).

Di dalam kawasan Asia Timur, AS sejak awal 1950-an, telah memelihara hubungan aliansi yang penting dengan Jepang

dan Korea Selatan, yang diformalkan oleh *Major Mutual Security Treaty*. Peran fungsional dari dua sekutu lama Amerika Serikat dalam keseluruhan struktur keamanan nasional Pasifik secara historis sedikit berbeda. Korea Selatan telah menjadi garda terdepan dalam melawan Korea Utara dan konflik ini banyak menarik perhatian dunia internasional. Peran penangkal pasukan darat dan udara AS di selatan zona demiliterisasi sangat penting untuk menjaga perdamaian melawan rezim Korea Utara yang tetap sangat tegas, sebagaimana dibuktikan dengan tenggelamnya kapal perang angkatan laut Korea Selatan, dan penembakan Pulau Yeonpyeong Korea Selatan dalam beberapa tahun terakhir, meskipun kemampuan ekonominya menurun.

Sebaliknya di Jepang, pasukan AS secara konsisten melayani fungsi cadangan strategis yang kurang langsung namun tetap vital. Sejak awal 1970-an, Jepang menjadi tuan rumah yang sekarang merupakan satu-satunya kelompok pertempuran kapal induk AS yang berbasis di luar Amerika Serikat, serta satu-satunya Angkatan Ekspedisi Laut yang dikerahkan secara permanen di luar negeri, satu dari hanya tiga yang tersisa di seluruh dunia. Untuk keadaan darurat mulai dari Desert Fox (1998) hingga Desert Storm (1991) dan untuk bencana sipil mulai dari Sumatra (2004) hingga Sendai (2011), pasukan AS yang berbasis di Jepang telah memainkan peran penting di sektor keamanan global, di samping fungsi pertahanan mereka di sekitar Jepang yang bergejolak (Calder, 2013).

Tantangan pertama bagi aliansi AS, Jepang dan Korea Selatan adalah meningkatnya kekuatan politik, ekonomi, dan militer Cina, serta keterlibatannya yang dalam dalam urusan Korea, baik Utara maupun Selatan, menjadi kendala tidak langsung yang signifikan pada ikatan aliansi AS-Jepang-Korea Selatan, meskipun lebih banyak di bidang politik-ekonomi dari pada tentang masalah keamanan langsung. Tantangan kedua adalah menyangkut transformasi Korea Utara sendiri. Terlepas dari kelemahan ekonominya, bagaimanapun, teknologi militer

Pyongyang tumbuh lebih canggih, menjadikannya tenaga nuklir *de facto* dengan kemampuan proyeksi kekuatan yang muncul di luar pantainya. Korea Utara menjadi ancaman signifikan bagi Jepang ketika misil Taepodongnya berkembang, bahkan ketika kelemahan ekonominya menimbulkan tantangan yang semakin mendalam di masa depan bagi Korea Selatan.

Stabilitas dalam hubungan Jepang-Korea yang mengalami pasang surut dan ikatan antara Jepang, Korea Selatan, dan Amerika Serikat, jelas penting bagi Washington ketika Cina bangkit dan tantangan keamanan Korea Utara semakin dalam dan meluas. Ikatan kerja sama tiga negara seperti itu juga sangat penting bagi kepentingan strategis mitra keamanan Amerika Serikat di Asia Timur, apa pun hambatan politiknya. Dalam hubungan antara ketiga negara ini Amerika Serikat berupaya mendorong keterlibatan Jepang dan Korea Selatan diperluas dalam usaha-usaha keamanan multilateral yang lebih luas, terutama di bidang maritim, yang dibangun di atas Perundingan Trilateral Pertahanan yang telah diadakan setiap tahun sejak 2008. Latihan pencarian dan penyelamatan trilateral, diharapkan mampu dilanjutkan dan lebih diintensifkan. Keterlibatan Jepang-Korea juga diperluas melalui latihan-latihan lain juga, khususnya yang berhubungan dengan kontinjensi pertahanan laut dan udara, dengan pasukan AS yang berbasis di Jepang (Russel, 2017).

Pada pertemuan pertahanan trilateral di Washington pada bulan April 2015, Amerika Serikat menyerukan kepada Korea Selatan dan Jepang agar mengupayakan kerja sama untuk saling berbagi informasi mengenai nuklir dan rudal Korea Utara. Secara khusus, Amerika Serikat akan mempromosikan Perjanjian Perlindungan Informasi Militer (GSOMIA) antara Korea Selatan, Amerika dan Jepang, setelah mengembangkan kesepakatan berbagi informasi militer trilateral. GSOMIA merupakan perjanjian yang memiliki kekuatan kontrol, berbeda dengan kesepakatan berbagi informasi (KBS WORLD Radio , 2015).

2. Kerjasama pertahanan AS-Filipina dalam *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA).

Hubungan luar negeri Amerika Serikat dan Filipina sudah lama terjalin dalam hubungan sejarah dan budaya di masa lalu. Hubungan ini terjalin sejak Filipina adalah wilayah milik AS dari tahun 1898 hingga 1946. Dalam hubungannya dengan Filipina yang memiliki postur militer yang lemah dan kekurangan dana, AS adalah sekutu yang memiliki pengaruh penting terhadap kondisi pertahanan dan keamanan Filipina. Hubungan ini ditandai dengan AS dan Filipina menandatangani Mutual Defence Treaty (MDT¹) (Lum, 2012). Pada tahun 1991, hubungan kedua negara mengalami kerenggangan karena keputusan Senat Filipina yang tidak meratifikasi perjanjian pangkalan militer baru. Senat Filipina menutup dua pangkalan besar militer Amerika Serikat di Teluk Subic dan Clark.

Saat ini Filipina termasuk salah satu negara yang mengalami konflik dengan Cina mengenai masalah sengketa wilayah di Laut Cina Selatan. Karena melihat peningkatan militer Cina di Laut Cina Selatan maka, pada tanggal 28 April 2014 AS dan Filipina menyepakati kesepakatan mengenai peningkatan kerjasama pertahanan dan keamanan (*Enhanced Defense Cooperation Agreement*) yang di tandatangi oleh Menteri Pertahanan Filipina Voltaire T. Gazmin dan Duta Besar Amerika Serikat untuk Filipina Philip Goldberg di Camp Aguinaldo, di markas militer Filipina di kota Quezon, Manila Utara, Filipina. Perjanjian kerjasama pertahanan antara dua negara tersebut akan membantu memperkuat kemampuan pertahanan Filipina dan mendorong perdamaian dan kestabilan di kawasan Asia Pasifik. Dengan adanya kerjasama ini, Filipina

¹ MDT adalah bagian dari jaringan kerjasama keamanan Amerika Serikat yang ada di kawasan Asia Pasifik selama Perang Dingin.

mendorong AS untuk berkomitmen di kawasan ini (Brago, 2015).

Sebelumnya menteri pertahanan Filipina menawarkan delapan pangkalan militer kepada Amerika Serikat sehingga negeri Paman Sam dapat membangun sejumlah fasilitas untuk menyimpan peralatan, arsenal, dan berbagai suplai lainnya (Laude, Romero, & Brago, 2016). Selama perkembangannya, pada saat *Bilateral Security Dialogue* (BSD) tahunan yang keenam antara AS dan Filipina di Washington, D.C. pada 18 Maret 2016 diumumkan bahwa pasukan Amerika akan diizinkan mengakses 5 pangkalan militer Filipina yaitu; Pangkalan Udara Antonio Bautista di Palawan; Pangkalan Udara Basa dan Benteng Magsaysay di Luzon; Pangkalan Udara Lumbia di Mindanao utara; dan Pangkalan Udara Mactan-Benito Ebuena di Cebu. Kegiatan yang disepakati atas akses ke fasilitas ini adalah termasuk latihan kerja sama keamanan, pelatihan bersama dan gabungan, bantuan kemanusiaan dan bantuan bencana. Amerika Serikat diizinkan untuk melakukan perbaikan fisik ke fasilitas dan memiliki 'akses tanpa hambatan' ke situs-situs untuk preposisi pasokan, kendaraan, pesawat, bahan bakar, dll (Tilghman, 2016).

Semua lokasi yang disepakati adalah pangkalan udara dan bukan fasilitas angkatan laut. Ini menandakan niat Pentagon untuk membawa kembali kekuatan udara Amerika di Filipina melalui penyebaran pembom tempur, tanker pengisian bahan bakar udara, dan pesawat patroli maritim P-8 alih-alih kapal angkatan laut dan unit darat (Katz, 2016). Menempatkan pesawat-pesawat ini di pulau utama Luzon akan terbukti bermanfaat bagi Amerika Serikat dalam salah satu dari tiga kasus yang paling mungkin terjadi konfrontasi bersenjata dengan Cina di Laut Cina Selatan, di Selat Taiwan, dan di Kepulauan Senkaku yang disengketakan (Katz, 2016). Yang menarik, tak satu pun dari fasilitas militer AS sebelumnya, Clark Air Field dan Subic Bay, termasuk dalam daftar.

Dalam hal latihan militer gabungan antara Filipina dan Amerika Serikat, latihan ini dinamakan “Balikatan” atau yang berarti bahu membahu yang merupakan latihan perang tahunan di bawah *Mutual Defence Treaty* (MDT) tahun 1951. Latihan Balikatan pada 20 April 2015, Filipina melibatkan 5.000 tentara. Sedangkan Amerika Serikat mengirimkan 6.500 tentara. Latihan tersebut berlangsung di saat Filipina terlibat ketegangan dengan Cina terkait sengketa Laut Cina Selatan. Amerika Serikat berkomitmen mendukung sekutunya dalam menghadapi Cina setelah adanya *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA). Marinir Amerika Serikat Christopher Mahoney mengatakan latihan tahun 2015 melibatkan pendaratan amfibi, latihan tembak menembak dan pengawasan maritim yang lebih canggih. Penempatan personil Amerika Serikat tidak ditempatkan secara permanen di bawah *Enhanced Defense Cooperation Agreement* (EDCA) sesuai yang disetujui oleh kedua belah pihak (Romero, 2015).

Setelah latihan militer balikan tahun 2016, Sekretaris Pertahanan AS Ash Carter mengumumkan pengerahan sejumlah kecil Marinir AS, 200 pilot dan kru AS, bersama dengan enam pesawat A-10C dan tiga helikopter (Simon, 2016). Amerika Serikat juga akan mendirikan pusat komando dan kontrol di Filipina untuk mengoordinasikan operasi bersama antara militer AS dan Filipina. Unit komposit ini akan mendukung operasi, kegiatan, dan tindakan A.S yang sedang berkembang di Asia Tenggara, dan akan meningkatkan kemampuan komando dan kontrol antara kedua sekutu (Headquarters Pacific Air Forces Public Affairs, 2016).

Sedangkan dalam hal kemaritiman AS dan Filipina terbuka pada kerjasama patroli angkatan laut disekitar Laut Cina Selatan. Angkatan Laut Amerika Serikat (*United States Navy*) mengirimkan kapal perang yaitu USS Lassen ke daerah sengketa kepulauan Spratly di Laut Cina Selatan. Kapal berjenis pemusnah ini berlayar di wilayah 12 mil laut ke terumbu karang Subi yang dijadikan pulau buatan oleh Cina. Armada dari Pangkalan Militer Angkatan Laut ke-7 (*7th fleet*) Amerika

Serikat di Pasifik dipersiapkan untuk bersiaga di sekitar kawasan kepulauan Spratly. Beberapa kapal tempur, seperti USS Chung Hoon dan USS Howard telah bersiaga di Puerto Princess, kepulauan Palawan. Kapal induk seperti USS Independence dan USS George Washington, juga telah ditempatkan di pantai barat Filipina (Sari, 2013). Sebagai sekutu dekatnya, Amerika Serikat juga membantu Filipina dalam memodernisasi militernya di tengah memanasnya hubungan Filipina dan Cina yang disebabkan oleh sengketa pulau Spratly di Laut Cina Selatan.

3. Kerjasama nuklir Antara AS dan India

India sebagai *rising state* memiliki sejarah pemilikan nuklir yang kontroversial. India aktif dalam mengembangkan nuklir sejak tahun 1944. Keinginan India untuk mengembangkan nuklir pertama kali dikatakan oleh Perdana Menteri Jawaharlal Nehru dalam pidatonya yang berbunyi;

“We must develop this atomic energy quite apart from war-indeed I think we must develop it for the purpose of using it for peaceful purposes. Of course, if we are compelled as a nation to use it for other purposes, possibly no pious sentiments of any of us will stop the nation from using it that way.” (Nuclearweaponarchive.org, 2001).

Tidak hanya itu, Jawaharlal Nehru juga mengatakan bahwa India memiliki kapabilitas untuk mengembangkan nuklir yang dapat digunakan untuk keamanan negaranya. Oleh karena itu pada tahun 1945, India membentuk *Tata Institute of Fundamental Research* (TIFR) yang merupakan institut penelitian nuklir yang menyediakan ilmu dan teknologi mutakhir yang dapat digunakan untuk membantu usaha pengembangan nuklir (Nuclearweaponarchive.org, 2001).

TIFR kemudian berkembang pesat dan dapat menghasilkan banyak program-program pengembangan nuklir. Pada tahun 1974, India berhasil melakukan uji coba nuklir

pertama kali dengan jangkauan ledakan sejauh 40 meter dan menghasilkan kawah sedalam 10 meter. Uji coba nuklir ini kemudian disebut dengan sebutan *The Smiling Buddha* (Nuclearweaponarchive.org, 2001). Keberhasilan India dalam uji coba nuklir pertamanya kemudian semakin mendorong negara tersebut untuk terus mengembangkan senjata nuklirnya. Hingga pada tahun 1998, pemerintah India melakukan uji coba nuklir kedua yang dinamakan Operasi Shakti dengan meluncurkan lima misil balistik sekaligus yang disebut Agni I-V dengan total jangkauan ledakan sejauh 5.500km. Operasi Shakti ini terjadi disebabkan oleh adanya provokasi dari Pakistan yang melakukan peluncuran rudal percobaan yang bernama Ghauri tanggal 6 April 1998. Uji coba tersebut kemudian menjadi uji coba nuklir terbesar yang pernah dilakukan India dan mendapatkan berbagai respon negatif dari banyak negara.

Tindakan India dalam melakukan percobaan nuklir ini menimbulkan reaksi dunia internasional. Pakistan, sebagai negara tetangga India yang paling dekat, melihat ambisi India dalam pengembangan nuklir tersebut dapat mendorong negara-negara lain yang ada di Asia untuk juga mengembangkan nuklirnya. Cina juga merespon uji coba nuklir India tahun 1998 dalam pernyataan juru bicara Kementerian Luar Cina, Zhu Bangzao, yang mengatakan bahwa uji coba nuklir India dapat membahayakan perdamaian dan stabilitas keamanan di Asia Selatan (Thehindu.com, 2016).

Di sisi lain, AS merespon hal tersebut dengan memberikan sanksi kepada India berupa sanksi ekonomi dan militer melalui the *Arms Export Control Act* (AECA) (Morrow & Carriere, 1999). Namun, Pasca tragedi 9/11 yang menimpa AS tahun 2001, pemerintah AS mencabut sanksi internasional yang dikenakan pada India terkait percobaan nuklirnya tahun 1998. Dibawah pemerintahan presiden George W. Bush kebijakan AS mengarah pada perbaikan hubungan bilateral antara AS-India. Hubungan kedua negara ini semakin membaik tahun ke tahun. Pada tahun 2002 AS dan India sepakat

bekerjasama dalam bidang pertahanan dan kemudian melebar kebidang lainnya seperti bidang ekonomi, perdagangan & investasi, keamanan dan pertahanan militer, *counter-terrorism*, keamanan cyber dll (Mea.gov.in, 2013).

Hingga pada tahun 2008, AS dan India sepakat menyetujui perjanjian yang memfasilitasi kerjasama nuklir antara kedua negara yang telah diratifikasi oleh kongres AS yang bernama *U.S.–India Civil Nuclear Agreement* atau *Indo-US nuclear deal*. Perjanjian ini merupakan sebuah langkah lanjutan atas kerjasama nuklir AS-India pada tahun 2005 yang bertajuk *U.S.-India Civil Nuclear Cooperation Initiative* atau lebih dikenal *123 agreement* (Sultan & Adil, 2008).

Perjanjian senilai 27 miliar USD ini berisikan bahwa AS akan membangun 18 sampai 20 reaktor nuklir di India hingga tahun 2020. Tim pengawas internasional berhak untuk memeriksa instalasi nuklir sipil India, sedangkan instalasi nuklir militer India tetap tertutup bagi tim pengawas internasional (IAEA). Selain itu, India akan mendapatkan akses terhadap bahan bakar nuklir dari AS dan pemasok lainnya yakni dari *Nuclear Suppliers Group* (NSG). India kemudian dapat bertransaksi untuk pembelian *dual-use* teknologi nuklir dari AS, termasuk material dan peralatan yang digunakan untuk memperkaya uranium atau memproses plutonium dan berpotensi membentuk material bom nuklir selain dapat menambah pasokan gas untuk reaktor nuklirnya (Bajoria & Pan, 2010).

Perjanjian kerjasama nuklir antara AS-India ini memunculkan banyak perhatian dari dunia internasional. Menariknya Amerika Serikat dalam menyikapi nuklir India, awalnya memberikan respon yang negatif dengan memberlakukan sanksi pada percobaan nuklir India tahun 1998. Namun pada tahun 2001, Amerika Serikat merubah sikapnya dengan mengangkat seluruh sanksi yang pernah diberlakukan kepada India. Sedangkan pada tahun 2005 dan puncaknya tahun 2008, untuk pertama kalinya AS

memperbolehkan negara yang berada diluar *Nuclear Non-Proliferation Treaty* (NPT) memiliki nuklir. Dan AS juga secara tegas memberikan dukungan kepada India untuk bergabung dengan *Nuclear Suppliers Group* (NSG) walaupun India belum menandatangani perjanjian non-proliferasi senjata nuklir. Hingga tahun 2015, perjanjian nuklir AS dan India ini belum sepenuhnya berjalan (Malik, 2015), dan pada tahun 2016 kedua negara setuju untuk membuat aturan kontak pembangunan 6 reaktor nuklir di India pada tahun 2017 (The White House, 2016).

Dengan demikian, Pemerintah AS memerlukan sosok India dalam kerjasama dibidang nuklir ini karena hal ini merupakan keuntungan bagi AS dalam menjaga kepentingannya di Asia termasuk kepentingan untuk mengimbangi kebangkitan Cina. Hal ini selaras pula dengan Kongres AS selaku pemerintah legislatif yang berasumsi sama dengan hal tersebut